

## **BAB II**

### **LATAR BELAKANG HUBUNGAN AUSTRALIA-INDONESIA**

Hubungan antar negara pada dasarnya harus mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tidak semua negara bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang bermukim di daerah itu, sehingga harus dicukupi dari tempat lain yang hampir selalu menyangkut kepentingan negara lain. Maka dari itu hubungan kerjasama internasional dalam bentuk kerjasama bilateral<sup>1</sup> dan multirateral<sup>2</sup> sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing negara tersebut.

Para ahli geografi politik berusaha mendapatkan kebijaksanaan nasional yang terbaik berdasar kondisi, posisi dan potensi wilayah yang bersangkutan. Menurut Daldjoeni dalam bukunya, geografi politik adalah suatu analisis geografis dari gejala politik,<sup>3</sup> dalam arti sempit geografi politik sebenarnya menelaah suatu negara (*Nation State*) menjadi serba menyerap atau menembus bagi manusia modern yang kegiatan berpolitiknya diperoleh atau diinspirasikan oleh negara.

Australia dan Indonesia sebagai suatu negara yang bertetangga. Kebijakan nasionalnya ditentukan oleh posisi, wilayah, sumber kekayaan, batas wilayah dan

---

<sup>1</sup> Kerjasama Bilateral adalah hubungan dari kedua belah pihak atau perjanjian antara negara bersahabat. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 151.

<sup>2</sup> Kerjasama Multirateral adalah hubungan kerjasama yang melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa. Lihat *ibid.*, hlm. 762.

<sup>3</sup> Daldjoeni, N, *Dasar-Dasar Geografi Politik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 15.

segi geografi. Untuk memahami tentang Australia dan Indonesia, penulis menjelaskan secara singkat letak geografis Australia, letak geografis Indonesia, hubungan Australia Indonesia pada awal kemerdekaan dan kebijakan politik luar negeri Australia Perdana Menteri Robert Menzies (1949-1966).

#### **A. Letak Geografis Australia**

Australia merupakan benua paling datar dan juga paling kering. Panjang dari timur ke barat 4.000  $\text{km}^2$ , dan dari utara ke selatan berjarak 3.200  $\text{km}^2$ . Luas daratannya 7.682.850  $\text{km}^2$ , dari luas tersebut 2.972.330  $\text{km}^2$  terletak di sebelah utara garis balik selatan.<sup>4</sup> Setengah dari benua Australia kira-kira sama dengan daratan Eropa tanpa Rusia dan juga hampir menyamai luas Amerika Serikat tanpa kepulauan Hawaii dan Alaska.

Australia yang nama resminya *The Commonwealth of Australia* adalah suatu federasi dari enam negara bagian, yakni New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Australia Barat, dan Tasmania, di tambah dua wilayah intern yaitu *Northern Territory* dan *Australian Capital Territory*. Wilayah ekstern terdiri dari kepulauan Norfolk, wilayah Antartika Australia, Kepulauan Cocos, dan Pulau Christmas di Samudera Hindia, serta mencakup wilayah Kepulauan Laut Coral yang terdiri dari sejumlah Pulau kecil di kawasan pasifik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Syahbuddin Mangandaralam, *Australia Negara Kangguru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm. 1.

<sup>5</sup> Redaksi Ensiklopedia Indonesia, *Eksiklopedia Indonesia seri geografi Australia Oseania*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, hlm. 9.

Sepertiga benua Australia terletak di kawasan tropis dan dua pertiga sisanya terletak di kawasan subtropis dan kawasan beriklim sedang. Pada umumnya salju turun hanya di pegunungan tenggara selama musim dingin. Berdasarkan letaknya Australia ternyata beriklim lebih panas dari daratan lain dengan garis lintang yang sama. Maka dari itu, banyak tempat yang kelembabannya rendah, temperatur musim panas yang tinggi tidaklah melelahkan. Pada umunnya tanah Australia tidak menunjukkan hubungan langsung dengan iklim.

Australia adalah benua yang diapit dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Garis pantai Australia di bagian barat laut dan utara membentuk garis perbatasan yang paling dekat dengan Kepulauan Indonesia. Pantai timur Australia seluruhnya dikelilingi oleh Samudera Pasifik, yang mengaitkan negeri itu dengan benua Amerika bagian utara dan selatan. Pada 9 Maret 1950, Menteri Luar Negeri Australia yaitu P.C. Spender menyatakan bahwa “Kebijaksanaan luar negeri setiap negara haruslah terutama dan senatiasa dikaitkan dengan keadaan geografisnya dan kepentingan pertama kita yang tidak berubah haruslah keamanan tanah air kita sendiri, serta pemeliharaan perdamaian di kawasan tempat kita berada secara geografis”.<sup>6</sup>

Australia juga bisa dilihat sebagai sebuah benua yang dikelilingi oleh dua samudera pada ketiga sisinya, dengan Irian Barat dan pulau-pulau yang berdekatan membentuk sebuah atap di atas pantai utara negeri itu. Sabuk Utara ini

---

<sup>6</sup> Hilman Adil, *Hubungan Australia dengan Indonesia 1945-196*, Jakarta: Djambatan, 1993, hlm. 6.

membentuk sebuah kunci strategis bagi pertahanan Australia. Meskipun Irian Barat dan pulau-pulau sekitarnya dipandang sebagai pulau penangkal bagi Australia, namun kerap pula dinilai sebagai garis lemah dalam pertahanan negeri Australia.

Australia terletak di ujung rute laut dunia, rute ini melintasi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta melayani angkutan barang-barang ekspor ke luar negeri. Untuk wilayah Asia dan Eropa lewat Terusan Suez dan rute ke negara-negara Arab di Timur Tengah. Sedangkan yang kedua, rute yang melintasi Samudera Pasifik ke benua Amerika Utara dan Hindia ke Jepang dan Asia Tenggara.<sup>7</sup> Maka dari itu, apabila rute-rute itu jatuh ke tangan satu atau beberapa negara yang bermusuhan terhadap Australia, kedudukan Australia akan terancam karena kehidupan ekonomi Australia sangat tergantung pada perdagangan luar negeri.

Australia berpendapat bahwa invasi asing akan datang dari daratan Asia atau dari Indonesia yang berada di seberang Samudera Hindia dan Pasifik. Maka dari itu, pertahanan militer Australia secara tradisional terpusat pada pertahanan garis pantai utaranya, yaitu berhadapan dengan Indonesia. Sedangkan kepentingan strategis Australia diukur dari jarak negara-negara tersebut terhadap Australia. Hal ini berarti Indonesia menduduki tempat terpenting terhadap keamanan Australia.

Indonesia dianggap penting bagi Australia karena memiliki kemungkinan untuk melakukan invasi terhadap Australia melalui Irian Barat. Keutamaan Indonesia bagi pertahanan Australia terletak pada pengendalian pangkalan-

---

<sup>7</sup> Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002, hlm. 45.

pangkalan laut dan udara di negeri itu oleh kekuatan yang potensial dan bermusuhan. Pangkalan yang berada di tangan musuh itu bisa melancarkan operasi-operasi kecil yang akan mengacaukan komunikasi laut Australia. Kekhawatiran ini melahirkan konsep “*defence in depth*”<sup>8</sup> atas dasar pemikiran ini para pendahulunya berinisiatif mengambil pulau-pulau tidak bertuan yang ada di sekitar Australia.

## B. Letak Geografis Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara  $6^{\circ}$  garis lintang utara sampai  $11^{\circ}$  garis lintang selatan, dan dari  $97^{\circ}$  sampai  $141^{\circ}$  garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia atau Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Apabila perairan antara Pulau-Pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia  $1.904.569 \text{ km}^2$ , Lima Pulau besar di Indonesia adalah : Sumatera dengan luas  $473.606 \text{ km}^2$ , Jawa dengan luas  $132.107 \text{ km}^2$ , Kalimantan (Pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas  $539.460 \text{ km}^2$ , Sulawesi dengan luas  $189.216 \text{ km}^2$ , dan Papua dengan luas  $421.981 \text{ km}^2$ .<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Defence in depth* adalah lini pertama pertahanan Australia harus sejauh mungkin dari benua Australia. Lihat *ibid*, hlm. 46.

<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia, *Posisi Geografis Indonesia*, 2009, tersedia dalam <http://www.indonesia.go.id/id/index.php>, diakses 29 Maret 2010 pukul 21.55

Berdasarkan bentang alamnya secara umum, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dataran barat dan dataran timur yang dangkal, serta cekungan tengah yang lebih dalam. Dataran barat yang mempunyai perairan laut dangkal disebut Dangkalan Sunda. Dataran timur juga mempunyai perairan dangkal yang disebut Dangkalan Sahul. Perairan laut dangkal ini meliputi Laut Arafuru dan perairan di lepas pantai Papua dan Kepulauan Aru. Dengan demikian, sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua benua dan dua samudera, maka wilayah Indonesia boleh dikatakan merupakan kelanjutan dari benua Asia dan benua Australia pada Dangkalan Sunda dan Dangkalan Sahul-nya, dengan celah yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik pada cekungan tengahnya.<sup>10</sup>

Luasnya wilayah Indonesia ini tentu saja mempunyai batas-batas wilayah antar negara. Utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Timur berbatasan dengan Papua Nugini, Samudera Pasifik. Selatan berbatasan dengan Australia dan Timor-Timur.

Bentuk, keadaan, posisi dan lokasi geografis Indonesia sangat mempengaruhi dalam menetapkan kebijakan politik dalam negeri dan luar negerinya. Pada tahun pertama perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan politik luar negeri Indonesia belum dirumuskan secara jelas. Politik luar negeri yang dilakukan dalam periode tersebut, terutama dalam bentuk negosiasi diplomatik dengan Belanda melalui Inggris sebagai perantara, dan forum

---

<sup>10</sup> Redaksi Ensiklopedia Indonesia, *Eksiklopedia Indonesia seri geografi Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, hlm. 9-10.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)<sup>11</sup> ditujukan untuk mendapat pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Seperti yang dikemukakan Presiden Soekarno pada awal September 1945 menyatakan bahwa kebijakan yang sekarang ditempuh oleh Republik Indonesia haruslah diarahkan pada dunia internasional. Untuk itu, persyaratan utama ialah diplomasi. Tetapi tak ada bangsa yang dapat memasuki gelanggang internasional hanya dengan cara diplomasi saja. Di balik diplomasi itu yang sungguh sangat mendasari diplomasi itu, haruslah kekuatan paksaan.<sup>12</sup>

Bulan Februari 1948 segera sesudah pembentukan pemerintahan Muhammad Hatta di depan Badan Pelaksana Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)

---

<sup>11</sup> Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi lahir pada tanggal 24 Oktober 1945. Organisasi ini digagas oleh lima negara besar yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Berdirinya PBB diawali dari pembicaraan antara PM Inggris Winston Churchill dan Presiden AS Franklin Delano Roosevelt pada tanggal 4 Agustus 1941 di Kapal Augusta. Pembicaraan tersebut menghasilkan Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*). Selanjutnya diadakan konferensi di Dumbarton Oaks, Amerika Serikat pada tanggal 21 Agustus - 7 Oktober 1944. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan tentang pembentukan disebut *United Nations Organization* (UNO) atau PBB. Pada tanggal 4 - 11 Februari 1945, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, dan Stalin menyelenggarakan Konferensi Yalta. Selanjutnya pada tanggal 25 April - 25 Juni 1945, 50 negara menyetujui usul-usul yang tertuang dalam *Declaration of United Nations* (Piagam PBB). Piagam ini ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 1945. 50 negara peserta yang menghadiri Konferensi San Fransisco disebut anggota asli PBB. Lihat Buku Sekolah Elektronik, *Perkembangan Lembaga-Lembaga Internasional dan Peran Indonesia dalam Kerjasama Internasional*, 2009, [http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perkembangan\\_LembagaLembaga\\_Internasional\\_dan\\_Peran\\_Indonesia\\_dalam\\_Kerjasama\\_Internasional\\_9.2 %28BAB\\_14%29](http://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perkembangan_LembagaLembaga_Internasional_dan_Peran_Indonesia_dalam_Kerjasama_Internasional_9.2 %28BAB_14%29). Diakses 1 Mei 2010 pukul 21.30

<sup>12</sup> Kekuatan paksaan adalah suatu administrasi fungsional yang dapat melaksanakan kewenangan dan dapat mencegah timbulnya anarki dan terror. Lihat Michael Leifer, "Indonesia's Foreign Policy", a.b, A. Ramlan Surbakti. *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986, hlm.6.

menyatakan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Pernyataan Muhammad Hatta dibuat sebagai tanggapan terhadap kaum komunis yang pada waktu itu bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat (FDR)<sup>13</sup> berpihak kepada Uni Soviet dalam Perang Dingin. Inti dari prinsip politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia dalam situasi internasional yang ditandai dengan konflik antara dua raksasa adalah non-blok dan berdikari.

Pada waktu yang bersamaan Indonesia ingin mempunyai hubungan persahabatan dengan semua bangsa dan memperoleh pertolongan dari dunia luar. Selama masa perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaannya dan memperoleh pengakuan internasional. Politik luar negeri Indonesia dijalankan terutama bukan sebagai tanggapan terhadap konflik antara Timur dan Barat. Tujuan utamanya adalah untuk menolak penegakan kembali kekuasaan kolonial Belanda.

Pada waktu yang bersamaan Indonesia berjuang untuk memperoleh pengakuan internasional atas statusnya sebagai negara yang baru merdeka. Untuk mendapat pengakuan tersebut Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia dalam masa perjuangan kemerdekaan dan mendapat tanggapan positif dari pemerintah Australia yang dipimpin Perdana Menteri Joseph Ben Chifley atau yang biasa dikenal Ben Chifley.

---

<sup>13</sup> Front Demokrasi Rakyat (FDR) merupakan gabungan partai dan organisasi kiri yakni Partai Sosialis (PS), Partai Komunis Indonesia (PKI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia Jilid 6 Edisi Muktahir*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992, hlm. 232.

### **C. Hubungan Australia Indonesia pada Awal Kemerdekaan Indonesia**

Dua tetangga yang masih asing atau tetangga yang asing merupakan gambaran yang tepat mengenai hubungan Australia dengan Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia II. Australia hanya menaruh perhatian sedikit perhatian dan kontak dengan Indonesia. Sebagai dominion<sup>14</sup> Inggris, Australia menyadarkan pada hubungan diplomatik langsung antara Inggris dan Belanda. Australia cukup puas dengan sikap kurang peduli terhadap Indonesia pada saat itu. Sikap netral Belanda dalam politik luar negerinya serta masih kuatnya kedudukan Inggris di Malaya (Malaysia sekarang) memberikan rasa aman bagi Australia.

Pada bulan Februari 1942 tentara Jepang mulai menyerbu Indonesia dan sejak 10 Maret 1942 dibentuklah pemerintahan Kolonial Belanda dalam pengasingan di Australia. Sebagai anggota tentara Sekutu, Belanda dan pemerintahannya yang dalam pengasingan tersebut mendapatkan kekuasaan ekstra teritorial serta dibantu oleh Pemerintah Australia.

Penjajahan Jepang tersebut membuat banyak pengungsi Indonesia yang berkumpul di Australia. Di antara pengungsi ini ada pelaut dan pramugara Indonesia dari kapal-kapal Belanda, dan ada juga tentara Indonesia dari angkatan bersenjata Belanda, serta petugas dan pegawai kesehatan. Pada tahun 1943 Belanda mengangkut 500 orang lebih ke Australia, baik pria, wanita dan anak-

---

<sup>14</sup> Dominion adalah negara yang merdeka dan berpemerintahan sendiri, tetapi menjadi anggota Persemakmuran. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 273.

anak, dari perkampungan tawanan di kamp Tanah Merah, Boven Digoel, Irian Barat.<sup>15</sup>

Belanda bermaksud untuk mengasingkan para tawanan ini di Australia. Para tawanan ini berhasil menyampaikan surat kepada seorang pekerja pelabuhan dan kemudian juga kepada seorang pegawai kereta api Australia. Surat-surat ini berisi penjelasan mengenai maksud Belanda tersebut di atas dan mereka meminta bantuan kepada masyarakat Australia.

Tanggapan terhadap surat ini cepat dan kuat. Serikat Buruh Australia (*Australian Workers Union/AWU*)<sup>16</sup> melakukan kampanye secara bersemangat dan berhasil membebaskan para tawanan ini. Mereka juga membantu orang-orang Indonesia yang terdampar di Australia akibat Perang Dunia II, untuk mengatur pemberian dukungan bagi negaranya. Sesudah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, semakin bersemangat kampanye yang dilakukan oleh Serikat Buruh di Australia. Serikat Buruh tersebut menekan Pemerintah Australia agar mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dua hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Terdapat beberapa

---

<sup>15</sup> Kedutaan Besar Australia, *Hubungan Australia-Indonesia*, 2009, tersedia dalam <http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html> diakses 9 April 2010 pukul 00.15

<sup>16</sup> *Australian Workers Union* adalah serikat buruh besar yang didirikan pada tahun 1890-an yang pada awalnya bernama Serikat Buruh tukang cukur Domba. Lihat Australia Asia Worker Links, *Anggota-anggota Serikat Buruh mendukung Hak atas Tanah*, Minggu 21 Maret 1999, tersedia dalam [http://archive.aawl.org.au/documents/pdf/our\\_mixed\\_history\\_indonesian\\_mar\\_99.pdf](http://archive.aawl.org.au/documents/pdf/our_mixed_history_indonesian_mar_99.pdf), diakses 12 April 2010 pukul 23.22

perbedaan pendapat dan perdebatan di Amerika Serikat mengenai apa yang harus diperbuat Indonesia. Para pendukung Eropa, terutama pendukung Belanda menyatakan bahwa sebaiknya Amerika Serikat tidak campur tangan dan membiarkan Indonesia kembali ke statusnya sebelum Perang Dunia II, yaitu sebagai jajahan Belanda. Di pihak lain, pendukung Asia menyarankan agar Indonesia diberi kesempatan untuk merdeka.

Posisi Australia secara diplomatik nampaknya dipengaruhi oleh pendukung-pendukung Belanda di Amerika Serikat dan kewajiban Australia sebagai sekutu Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini ditunjukkan oleh pemerintah Australia pada saat itu bahwa Belanda harus bertanggungjawab menjalankan kedaulatannya atas pulau-pulau Indonesia di luar pulau Jawa yang diduduki oleh pasukan-pasukan Australia atas nama pasukan sekutu.

Sementara di Australia berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diterima oleh orang-orang Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Mereka menyambut kemerdekaan Indonesia dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran di Sydney. Demonstrasi ini didukung oleh orang-orang Australia yang bergabung dalam Buruh Pelabuhan Australia *Waterside Workers Federation* (WWF) dan Serikat Buruh lainnya. Semua koran di Sydney seperti *The Sun*, *Sydney Morning Herald* dan surat kabar lainnya memberitakan demonstrasi tersebut dalam berita utama. Tidak luput pula dari radio di Sydney memberitakan kemerdekaan Indonesia itu keseluruh dunia dengan demikian secara tidak langsung Australia telah mengakui kemerdekaan Indonesia.

Orang-orang Indonesia yang berada di Australia mendirikan organisasi kemerdekaan di Australia pada tahun 1944 di Brisbane, dan diberi nama Central Komite Kemerdekaan Indonesia (CENKIM).<sup>17</sup> Pada tanggal 1 september 1945 CENKIM mengeluarkan sebuah manifesto yang isinya mengajak seluruh orang Indonesia di Australia untuk memberontak dengan mengadakan mogok kerja. Kemudian diikuti oleh para buruh pelabuhan Australia yang melarang pengapalan ke atas semua kapal Belanda yang berlayar ke Indonesia sejak 20 September 1945.

Federasi Buruh Pelabuhan di Dermaga Sydney pada tanggal 24 September 1945, yang menyatakan “Empat buah kapal yaitu Japara, El Libertador, General Verspijck dan Patras yang sedang dimuati dengan suplai bagi tentara Belanda yang dibawa dari Inggris dengan tujuan untuk membiayai perang melawan kemerdekaan Indonesia serta untuk membawa pemerintahan boneka Hindia-Belanda di Indonesia. Pemuatan kapal-kapal ini jelas bertentangan dengan ide-ide demokrasi Gerakan Buruh Australia. Membantu Belanda dengan cara apapun berarti membantu ketamakan imperialisme Belanda melawan demokrasi Indonesia”.<sup>18</sup>

Bulan Agustus 1946, Angkatan Laut Belanda meminta pasokan amunisi dan fasilitas pangkalan Australia. Kabinet memutuskan bahwa tidak satupun permintaan itu dipenuhi, serta diputuskan bahwa tidak baik untuk mangangkut

---

<sup>17</sup> George Margaret, “Australia and the Indonesia Revolution”, a.b, Hermawan Sulistyo dan Wardah Hafidz. *Australia dan Revolusi Indonesia*, Jakarta: Panja Simpati, 1986, hlm. 21.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 54-55.

amunisi dari Australia, meskipun pemuatannya ke kapal-kapal Belanda dengan Buruh serta pengakutan barang-barangnya dari Australia dengan tenaga mereka sendiri.

Pada 15 November 1947 ditandatangani Persetujuan Linggarjati,<sup>19</sup> dengan penandatanganan ini Belanda secara *de facto* mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatra, dan Madura. Namun Belanda dan Republik Indonesia bekerjasama dalam pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federal, yang meliputi wilayah-wilayah Republik dan non Republik di Hindia Belanda.

Menanggapi Persetujuan Linggarjati, rupanya Belanda mempunyai pikiran lain, di Jakarta para pejabat Belanda berfikir untuk mengadakan tindakan militer terhadap Indonesia sebagai alternatif penandatanganan Persetujuan Linggarjati. Maka pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan apa yang dikatakan sebagai Aksi polisional yang pertama.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Persetujuan Linggarjati merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung di daerah selatan Cirebon pada 10-15 November 1946 dari pihak Indonesia diwakil oleh Sutan Sjahrir sebagai ketua sedangkan dari pihak belanda diketuai oleh Prof Ir. Schermerhom menghasilkan 17 pasal. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 132.

<sup>20</sup> Tujuan aksi militer ini ternyata dibatasi pada menghancurkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan semua gerakan perlawanan bersenjata. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan oleh Pemerintah Belanda di Majelis Rendah pada 23 dan 24 Juli 1947. Alasan mereka ialah republik telah menjadi lambang dan eksponen aspirasi nasional Indonesia. Menduduki Yogyakarta hanyalah akan memperluas perang gerilya dan kerusuhan yang lebih besar, yang tidak akan menguntungkan usaha memulai kembali perundingan yang sesungguhnya. Dalam hal ini termasuk pendudukan ibukota republik, yang dianggap sebagai pusat elemen-elemen destruktif dan dengan demikian merupakan rintangan bagi berdirinya sebuah negara Federal. Lihat Hilman Adil, *op.cit.*, hlm. 110.

Atas tindakan Belanda itu Ali Sastroamidjojo di Canbera pada tanggal 24 juli 1947 menghimbau pada pemerintah Australia untuk mengajukan sengketa Belanda-Indonesia ke Dewan Keamanan PBB,<sup>21</sup> tetapi sikap pemerintah Australia ragu-ragu akan keberhasilan usulan itu sehingga republik Indonesia berinisiatif untuk mencoba berpaling meminta bantuan India. Pada tanggal 30 juli 1947 pemerintah India mengintruksikan wakilnya di PBB untuk meminta perhatian Dewan Keamanan PBB secepatnya terhadap perkembangan situasi di Indonesia. Usulan India rupanya tidak diperhatikan karena waktu itu bukan anggota Dewan Keamanan PBB.

Australia kemudian juga prihatin terhadap keadaan di Indonesia sehingga pemerintah Australia mengusulkan masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB. Rupanya usulan Australia lebih diperhatikan karena Australia pada waktu itu menjadi anggota Dewan Keamanan di samping itu alasannya dipandang lebih kuat daripada gagasan yang dikemukakan India. Australia beranggapan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap perdamaian Pasal 39 sedang India berangkat dari Pasal 34 perdamaian internasional sedang dalam bahaya.

---

<sup>21</sup> Dewan Keamanan merupakan salah satu unsur eksekutif di samping Dewan Ekonomi Sosial, dan Dewan Perwalian di dalam PBB. Keanggotaannya sebanyak 15 negara dengan rincian lima negara merupakan anggota tetap dan mempunyai hak veto. Sepuluh Negara tidak tetap, dipilih oleh majelis umum untuk jangka waktu 2 tahun. Pemilihan anggota didasari pada perimbangan besarnya sumbangannya serta letak geografis negara. Setiap negara mempunyai seorang wakil dan fungsi ketua dijabat secara bergilir. Tentang Dewan Keamanan diatur di dalam bab V, VI, VII, dan VIII. Lihat Frans. S. Fernandes, *Hubungan Internasional dan Peranan Bangsa Indonesia Suatu Pendekatan Sejarah*, Jakarta: Depdikbud, 1988, hlm. 61.

Pada sidang keamanan 31 Juli 1947 wakil Australia Kolonel Hodgson meminta perhatian dewan bahwa permusuhan yang sedang terjadi di Indonesia bukanlah semata-mata merupakan Aksi Polisioner melainkan adalah sebuah perang militer yang menurut hukum internasional berarti konflik diantara dua negara.

Australia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB kemudian mengajukan sebuah rencana resolusi yang antara lain berisi, memohon dilaksanakannya prosedur arbitrasi sesuai dengan Persetujuan Linggarjati. Merujuk kepada pelanggaran perdamaian menurut Pasal 39 Piagam PBB.<sup>22</sup> Resolusi ini mendapat tentangan keras dari negara-negara barat. Kemudian wakil Amerika Serikat mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB memberi jasa-jasa baik kepada pihak-pihak yang bersengketa, untuk itu dibentuklah Komisi Jasa-Jasa Baik atau lebih dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN). Indonesia memilih Australia duduk dalam komisi tersebut, sedangkan Belanda memilih Belgia, dan Amerika Serikat dipilih oleh Australia dan Belgia.

---

<sup>22</sup> Pasal 39 berisi Dewan Keamanan akan menentukan keberadaan ancaman kepada perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi dan akan membuat rekomendasi, atau memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian internasional dan keamanan. Lihat United Nations, *Charter of the United Nations*, 2009, tersedia dalam <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml>, diakses 14 April 2010 pukul 01.11

Inisiatif Australia agar masalah sengketa Belanda-Indonesia dibawa dalam Dewan Keamanan PBB menyebabkan ditandatanganinya Perjanjian Renville<sup>23</sup> antara Belanda dan Indonesia pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini Belanda mencoba mengambil kesempatan agar Australia mengambil tindakan untuk menghentikan boikot pengapalan barang-barang Belanda di Australia. Jawaban yang diberikan Australia malah menuduh Belanda sama sekali tidak menunjukkan penghargaan ataupun pengakuan atas peran yang dimainkan Australia dalam membantu tercapainya penyelesaian perselisihan Belanda-Indonesia.

Sementara itu Indonesia empat hari setelah Perjanjian Renville ditandatangi, penguasa sipil Belanda secara *Unilateral* menciptakan satu negara Federasi baru di Madura salah satu pulau yang sebelum aksi polisional Belanda I secara *de facto* berada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia, kemudian pada bulan Maret 1948, Belanda juga mendirikan Negara Jawa Barat dan tanpa republik.

Pada 18 September 1948 Partai Komunis melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Muso yang kembali dari Moskow pada tanggal 11 Agustus 1947, pemberontakan ini dibantu oleh

---

<sup>23</sup> Atas usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal *UUS Renville* yang sedang berlabuh di Jakarta. Persetujuan ini mengakui suatu genjatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai ‘garis van Mook’ suatu garis buatan yang menghubungkan titik-titik terdepan dari pihak Belanda walaupun dalam kenyataannya masih tetap ada banyak daerah yang dikuasai pihak Republik di belakangnya. Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 340.

Amir Syarifuddin sebagai pimpinan FDR yang kecewa dengan Perjanjian Renville untuk menggulingkan pemerintahan Muhammad Hatta.

Belanda mengambil kesempatan situasi di Indonesia ini melancarkan Aksi Polisional yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.<sup>24</sup> Sedangkan Pemerintah Australia memberi reaksi keras atas Aksi Polisional Belanda kedua. Lewat Departemen Luar Negerinya, Australia memberitahu Inggris bahwa kepentingan Australia di masa depan atas kemajuan, kemakmuran, dan ketentraman Indonesia berarti menghancurkan secara perlahan hingga Indonesia lenyap. Lebih lanjut berbicara mewakili Australia Mr. N.J.O. Makin mengatakan Tindakan Belanda tidak bisa dimaafkan, mengabaikan berarti memaafkan. Dewan harus segera mempertimbangkan untuk mengembalikan situasi damai di Indonesia dan rasa aman di Asia Tenggara.<sup>25</sup>

Pada tanggal 26 dan 27 Januari 1949, di Dewan Keamanan PBB Australia bersama-sama dengan India dan Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB agar menyerukan kepada kedua pihak untuk menghentikan seluruh operasi militer dan menyerukan kepada Belanda agar membebaskan tahanan politik Indonesia. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi pada tanggal 28 Januari

---

<sup>24</sup> Melihat situasi Republik Indonesia yang kacau akibatnya meletus pemberontakan PKI di Madiun maka pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda secara sepihak membatalkan persetujuan gencatan senjata esok harinya (19 Desember 1948 dini hari) tentara Belanda langsung menyerbu Lapangan Udara Maguwo, Yogyakarta. Serangan Belanda yang tiba-tiba berhasil dengan gemilang sehingga pada jam 16.00 WIB seluruh Yogyakarta sudah jatuh di tangan Belanda. Lihat M.C.Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 347.

<sup>25</sup> George Margaret, *op.cit.*, hlm. 197.

membentuk komisi PBB untuk Indonesia *United Nations Commission for Indonesia (UNCI)*.<sup>26</sup>

UNCI mempunyai wewenang untuk berunding dengan wakil-wakil daerah di Indonesia, mengambil tindakan sesuai pendapat mayoritas, memberikan usul atau anjuran kepada pihak-pihak dan atau Dewan Keamanan, mengawasi pemilihan umum di seluruh Indonesia, dan membantu serta melindungi pengembalian daerah-daerah Indonesia yang wilayahnya pada saat Perjanjian Renville. Resolusi ini sesuai dengan tuntutan Australia yang sejak lama diajukannya kepada Dewan Keamanan.

Belanda Rupanya tidak memperhatikan Resolusi Dewan Keamanan tertanggal 28 Januari 1949, tetapi Belanda mempunyai inisiatif sendiri untuk melaksanakan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS). Oleh karena itu Belanda mengadakan konferensi di Den Haag pada 12 Maret 1949 untuk membicarakan pembentukan pemerintahan serikat sementara, pengalihan kedaulatan, dan pembentukan Uni-Indonesia.

Pada tanggal 21 April 1949 delegasi Belanda di Jakarta mengumumkan bahwa Belanda setuju memulihkan kembali Indonesia di Yogyakarta dan membebaskan para pemimpin Indonesia dengan syarat kegiatan gerilya dihentikan dan pemerintah Indonesia setuju untuk menghadiri Konferensi Meja Bundar

---

<sup>26</sup> Susan Critchley, “Australian Relations with Indonesia: What Went Wrong”, a.b, Sugiarta Sriwibawa. *Hubungan Australia dengan Indonesia: Faktor Geografi, Politik dan Strategi Keamanan*, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 44.

(KMB) di Den Haag.<sup>27</sup> Indonesia menerima usulan Belanda, sehingga pada tanggal 17 Mei 1949 ditandatangani Perjanjian Roem-Royem yang isinya Indonesia setuju untuk menerima usul Belanda yang akan memulihkan pemerintah Indonesia di Yogyakarta dan membebaskan semua tawanan Indonesia sebagai imbalan kesediaan Indonesia untuk datang ke KMB.

Diselenggarakannya KMB di Den Haag pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949, Indonesia diakui sebagai negara merdeka secara *de facto* dan *de jure*. Sehingga dapat menjalankan pemerintahan sendiri, walaupun dengan bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia untuk menciptakan negara merdeka yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mengenai masalah Irian Barat ini masih menjadi ganjalan dalam proses perdamaian dalam KMB. Pemerintah Australia mengusulkan dua hal pertama, menyarankan agar Irian Barat ditempatkan di bawah Perwalian Internasional

---

<sup>27</sup> Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Drs. Moh Hatta, dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen. Dari PBB dipimpin oleh Crittchlay. Menghasilkan keputusan pertama Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat, kedua Penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikutnya, ketiga RIS sebagai negara berdaulat penuh kerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan yang kepala oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama. Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsensi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan. Kelima, Semua utang bekas Hindia Belanda harus di bayar oleh RIS. Lihat Jeny Sibarani, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan antara Tahun 1945–1950an*, 2008, tersedia <http://sejarahkita.comoj.com/jenny112.html>, diakses 12 Mei 2010 pukul 11.14

dengan PBB atau Indonesia, atau Belanda memegang kekuasaan pengawasan, dan yang kedua menyarankan penundaan penyelesaian masalah Irian Barat selama setahun.<sup>28</sup> Tetapi Indonesia menolak usul itu, sampai akhirnya masalah Irian Barat menjadi masalah serius ditahun-tahun berikutnya yang melibatkan Australia.

#### **D. Kebijakan Politik Luar Negeri Australia Perdana**

##### **Menteri Robert Menzies (1949-1966)**

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada 10 Desember 1949 menghasilkan kekalahan bagi partai Buruh yang di pimpin Ben Chifley. Sebagai gantinya, muncullah pemerintahan koalisi Partai *Liberal* dan Partai *Country* (Nasional) di bawah Perdana Menteri Robert Menzies. Kemenangan Partai *Liberal-Country* ini tentu saja merubah sikap kebijakan politik luar negeri Australia terhadap Indonesia, yang sebelumnya mendukung lewat berbagai forum internasional sekarang berbalik arah.

Pada tanggal 19 Desember 1949, Robert Menzies dilantik sebagai Perdana Menteri Australia untuk kedua kalinya. Sebelumnya ia menjabat pada periode 1939-1941, namun ia mengundurkan diri pada 29 Agustus 1941 karena banyak mendapat tekanan dari dalam kabinetnya dan Partai Buruh. Robert Menzies merupakan Perdana Menteri terlama menjabat yaitu lebih dari 19 tahun dan ia juga yang merancang dasar-dasar kebijakan partai.

---

<sup>28</sup> Hilman Adil, *op.cit.*, hlm. 99.

## 1. Kebijakan Partai *Liberal-Country*

Partai *Liberal-Country* adalah salah satu partai besar di Australia, yang dibentuk untuk menentang keberadaan Partai Buruh. Partai ini pernah memerintah selama 23 tahun (1949-1972), suatu rekor masa memerintah dalam sejarah Australia. Partai ini memperjuangkan aspirasi kaum kapitalis kelas menengah Australia, yang merasa kesulitan dengan semakin berkembangnya aktivitas gerakan buruh.

Partai *Liberal* yang modern sebenarnya baru terbentuk sejak 1944, ketika Robert Menzies memimpin partai ini. Pada pemilihan umum 1949 Partai *Liberal* dan Partai *Country* (Nasional) kemudian bergabung. Kelompok-kelompok liberal yang menjadi anggota parlemen yang memiliki kesamaan kepentingan, yaitu menentang perwakilan kaum buruh di parlemen. Maka dari itu, mereka sering dijuluki sebagai koalisi non-buruh. Partai ini selalu berusaha memperlihatkan dirinya berbeda dengan Partai Buruh. Perbedaan-perbedaan tersebut tampak dari berbagai segi seperti ideologi dan kebijakannya, struktur partainya, dan kedudukan anggota-anggota parlemennya.<sup>29</sup>

Program kerja Partai *Liberal-Country* menaruh perhatian terhadap hak-hak individual dan kebebasan dari ancaman yang berasal dari negara. Partai ini juga bertujuan menumbuhkan kemampuan kgiatan individual sebagai basis untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Dampak dari rencana kerja Partai *Liberal-Country* adalah bahwa rencana kerja tersebut menginginkan peranan

---

<sup>29</sup> Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Jakarta: LIP FISIP UI dan Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 220.

negara yang semakin kecil dalam pengelolaan ekonomi dan adanya keinginan untuk membatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan negara terhadap hak-hak individual.<sup>30</sup>

Selama 25 tahun memimpin (1944-1966), Robert Menzies merancang seluruh struktur organisasi, gaya dan kebijakan Partai *Liberal*. Dukungan terhadap Robert Menzies tampak dari struktur dan proses kepartaian yang direncanakannya. Pada dasarnya Robert Menzies menekankan tiga dasar dalam pembentukan Partai *Liberal* modern ini. Pertama, pertama partai harus berstruktur federal dengan memberikan otonomi yang agak luas bagi organisasi-organisasi cabang negara bagian. Kedua, partai harus mempunyai basis massa dan keanggotaan yang luas dan besar, sehingga partai dapat melaksanakan segala kegiatan organisasi melalui kontribusi iuran anggota. Ketiga, harus ada pemisahan yang tegas antara organisasi partai dengan sayap parlemen.<sup>31</sup>

Pada 1965 ketika memperingati 21 tahun Partai Liberal modern Robert Menzies menyatakan kebijakan Partai *Liberal-Country* “kita telah mengkaji bahwa jawaban yang benar adalah menetapkan kebebasan individu, untuk mencapai persamaan kesempatan, melindungi individu melawan penindasan, menciptakan masyarakat di mana hak-hak dan tanggung jawab diakui dan menjadi efektif. Dalam masyarakat yang bebas ini, gagasan bersifat tirani dari sebuah

---

<sup>30</sup> Richard Chauvel H, “Politics Down Under: Kehidupan Politik dalam Negeri Australia”, dalam Sujinah Harlinah dan Ismu (Ed), *Budaya dan Politik Australia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995, hlm. 19-20.

<sup>31</sup> Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 223.

negara yang menguasai seluruhnya harus ditolak, berikut dogma-dogma sosialismenya”.<sup>32</sup>

## 2. Kebijakan Politik Luar Negeri

Kekalahan Partai Buruh pada pemilu 1949, menandai berkuasanya pemerintahan koalisi *Liberal-Country*. Pemerintah koalisi *Liberal-Country* yang memenangkan secara berturut-turut pada tujuh pemilihan umum selanjutnya, mengaitkan garis kebijakan luar negeri Australia dengan masalah pertahanan dan perdagangan luar negeri. Pada waktu itu, suasana Perang Dingin telah berkecamuk di daratan Eropa, dunia terbagi atas blok Barat yang kapitalis dan blok timur yang sosialis-komunis.

Perang Dingin juga terjadi di berbagai kawasan dunia lainnya, di mana negara-negara kecil dan negara-negara baru merdeka menjadi wilayah pengaruh dari kekuatan besar yang saling berebut pengaruh. Pemerintahan koalisi *Liberal-Country* pimpinan Robert Menzies tampaknya juga harus memilih posisi mereka di antara dua kekuatan besar yang saling bertarung. Pilihan yang diambil telah meletakkan Australia di dalam posisi yang Paralel dengan kepentingan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.

Pilihan memilih Amerika Serikat sebagai sekutu bukanlah tanpa alasan yang kuat. Sekurang-kurannya ada dua alasan yang mendasari yaitu pertama, secara tradisional Australia telah jauh terlibat dalam persekutuan pertahanan dan perdagangan dengan Inggris yang merupakan elemen penting dari kekuatan negara-negara Barat. kedua, Australia memerlukan dukungan sistem pertahanan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 231.

yang kuat untuk menjamin keamanan wilayah strategisnya di Pasifik Selatan agar jalur-jalur perdagangan luar negerinya tetap terjamin.<sup>33</sup>

Pendekatan dengan Amerika Serikat dimulai dengan menciptakan kepentingan keamanan bersama antara kedua negara. Antara lain pengiriman kontingen pasukan Australia ke dalam konflik-konflik yang melibatkan Amerika Serikat. Seperti Perang Korea 1950 dan Perang Vietnam. ikut serta dalam usaha-usaha menciptakan kestabilan di Asia Tenggara, serta mendukung Amerika Serikat dalam membangun perannya sebagai kekuatan keamanan global.

Pada 1 September 1951, Menteri Luar Negeri Percy Spender menandatangani Pakta ANZUS di San Fransisco. Pakta ini merupakan sebuah perjanjian pertahanan bersama yang mengaitkan Australia, dan Selandia Baru dengan kekuatan Amerika Serikat. Berdasarkan Perjanjian ANZUS, sejak 1962 dibangun berbagai fasilitas pertahanan dan ilmiah bagi kepentingan militer Amerika Serikat di Nort-West Cape (*Western Australia*), Pine Gap (*Northern Territory*) dan Nurrungar (*South Australia*).

Secara militer, keberadaan instalasi-instalasi riset militer Amerika Serikat di Australia, tentunya sangat berarti bagi sistem pertahanan Australia (dan Selandia Baru). Keterlibatan Australia yang terlalu jauh ke dalam sistem pertahanan Amerika Serikat, menimbulkan kekhawatiran bahwa bila instalasi tersebut menjadi sasaran tembak.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 401-402.

### 3. .... **Kebijakan**

#### **Politik Luar Negeri Terhadap Indonesia (1949-1966)**

Indonesia adalah negara tetangga yang terpenting bagi Australia. Sebagai suatu negara kepulauan yang besar dengan jumlah populasi yang besar pula, Indonesia terletak di antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Posisi geografis yang menghubungkan Australia dengan negara-negara di benua Asia. Indonesia menempati posisi strategis dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri Australia.

Pergantian pemerintahan di Australia dari Partai Buruh kepada koalisi Partai *Liberal-Country*, membawa perubahan pula dalam hubungan Australia dengan Indonesia. Pemerintahan koalisi *Liberal-Country* di bawah Perdana Menteri Robert Menzies menjalankan kebijakan luar negeri berbeda dengan komando Menteri Luar Negeri Percy Spender. Kebijakan luar negeri Australia yang dipengaruhi oleh situasi Perang Dingin, membawa Australia kepada sikap pro kepada kekuatan-kekuatan Barat.

Pemerintah Australia menyatakan keinginan agar Belanda tetap mengusai Irian Barat.<sup>34</sup> Padahal masalah Irian Barat merupakan salah satu persoalan yang masih mengganjal dalam penyelesaian kemerdekaan Indonesia di tangan Belanda. Pernyataan Australia bukanlah tanpa alasan yang mendasar, karena setelah invasi Jepang ke pulau Irian Barat menjelang Perang Dunia II, masyarakat dan Pemerintah Australia lebih menyakini bahwa pulau tersebut sangat penting bagi keamanan Australia. Australia lebih mengenal bangsa Belanda yang berada dalam satu kubu bangsa Barat, daripada bangsa Indonesia yang baru merdeka. Maka dari

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 421.

itu, Australia merasa keamanan wilayahnya akan lebih terjamin bila pulau tersebut berada di bawah kekuasaan Belanda.

Hubungan Australia-Indonesia mengalami titik terendah pada periode 1950-1962. Indonesia mengambil jalan keras dalam masalah Irian Barat, di mana kesatuan militer dikerahkan untuk menguasai Irian Barat. Sementara perjungan diplomasi dilakukan Presiden Soekarno dengan menggalang dunia ketiga. Sikap agresif Soekarno tersebut lebih menyakinkan Australia mengenai pentingnya Irian Barat berada dalam kekuasaan Belanda. Keyakinan demikian seolah dipertegas oleh sikap anti-Barat yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, yang membina hubungan persahabatan dengan negara-negara yang berideologi sosialis-komunis.

Kebijakan politik poros-porosan, seperti Jakarta-Peking-Hanoi sebagai penentangannya kepada negara-negara Barat. Munculnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu dari empat kekuatan besar di Indonesia setelah pemilihan umum 1955 semakin mengkhawatirkan sistem keamanan Australia. Kenyataan menunjukkan bahwa PKI mendukung garis kebijakan luar negeri Presiden Soekarno yang bersifat agresif terhadap masalah Irian Barat.

Australia tidak dapat berbuat banyak setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia pada 1962, dan menjadi bagian Indonesia melalui *Act Of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah supervisi PBB pada 1969. Hubungan kedua negara bertetangga ini menjadi dingin. Australia juga mengecam keras kebijakan luar negeri Indonesia, Pemerintah Australia mengirimkan pasukannya ke Malaysia dan Singapura dalam rangka menghalangi

kebijakan konfrontasi dengan Malaysia yang dijalankan Presiden Soekarno antara 1963-1966.

Hubungan Australia dan Indonesia mulai membaik sehubungan dengan pergantian pemerintahan di Indonesia, menyusul percobaan kudeta oleh PKI pada 1965 yang dikenal dengan peristiwa 30 September (G30S/PKI). Munculnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto disambut baik oleh kalangan politisi Australia. Australia segera mengakui kepemimpinan Orde Baru, karena Indonesia memperlihatkan sikap anti-komunis yang keras dan menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Barat.